



Musyawarah Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah

## Infrastruktur Masih Menjadi Prioritas Utama Pembangunan

Program perbaikan infrastruktur masih menjadi prioritas utama Pemkot Pontianak pada tahun 2023. Hal ini disampaikan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono saat menghadiri musyawarah rencana pembangunan pemerintah daerah, Selasa (22/3).

**MIRZA AHMAD MUIN,**  
*Pontianak*

**EDI** mengatakan, Pemkot Pontianak memiliki program strategis yang bakal diwujudkan. Di antaranya pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I, pembangunan mal pelayanan publik,

pembangunan rumah sakit di Kecamatan Pontianak Utara, pembangunan rusunawa, pelebaran jalan di sepanjang Sungai Jawi, kemudian pemancangan turap serta penyempurnaan jalan mantap dan jalan lingkungan mantap. Semua akan dibahas dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Pontianak tahun 2023.

Semua program ini, kata dia, sudah masuk radar realisasi. Seperti duplikasi Jembatan Kapuas I jika tidak terkendala tahun ini sudah bisa masuk tahap pemancangan pondasi. Sama halnya dengan mal pelayanan publik di Kapuas Indah juga sudah mulai berjalan pengerjaannya.

Kemudian pembangunan rumah sakit di Kecamatan Pontianak Utara malah sudah menampakkan fisik bangunannya.

◆ Ke Halaman 15 kolom 1

## Infrastruktur Masih Menjadi Prioritas Utama Pembangunan

Sambungan dari halaman 9

Tentunya jika bangunan ini sudah jadi, perlu menyiapkan sumber daya manusia agar perputaran kinerja di rumah sakit bisa operasional.

Ia tak menutupi perbaikan infrastruktur masih menjadi pekerjaan utama Pemkot Pontianak yang mesti dituntaskan. Dalam

upaya itu, tentu tak bisa dilakukan sekaligus. Itu karena alokasi anggaran yang minim. Agar program bisa berjalan semua, maka dibagi-bagilah anggaran ini.

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menuturkan, sebagaimana visi misi wali kota dan wakil wali kota Pontianak, seluruh kepala organisasi perang-

kat daerah harus mendukung dengan melakukan capaian-capaian yang telah dicanangkan.

"Kami lakukan pengawasan kepada para kepala OPD manakala tidak menyetujui atau menyelesaikan visi misi wali kota dan wakil wali kota," tegasnya.

Pihaknya akan mengawal Musrenbang RKPD ini hingga menjadi APBD

dengan tetap melihat program prioritas tahun 2023. Setelah itu, menuangkan dalam kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS).

"Pekan kedua bulan Juni itu sudah masuk dan dibahas di DPRD dan kami akan kawal hingga menjadi Perda APBD 2023," tutupnya. (\*)